

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agen*). *Agen dan Principal* berhubungan dalam pengelolaan perusahaan, yaitu bagaimana manajemen (*agen*) diberi wewenang untuk membuat keputusan oleh pemilik (*princial*) perusahaan. Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mengungkapkan hubungan kontraktual pemilik perusahaan dan manajer, di mana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agen* untuk mengelola perusahaan. Namun, sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak tersebut, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena manajer mungkin bertindak untuk kepentingan pribadinya daripada kepentingan Manajer (*agen*) setiap saat dapat mengawasi operasional perusahaan sehingga manajer lebih mengetahui kinerja perusahaan, pemilik perusahaan (*principal*) yang termasuk pemegang saham tidak setiap saat memantau kinerja perusahaan, sehingga manajer harus mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pihak pemegang saham. Ketidakseimbangan informasi, di mana manajer memiliki keunggulan dalam memahami kondisi operasional perusahaan, menjadi salah satu pemicu utama timbulnya konflik keagenan

Perusahaan sering mengalami konflik keagenan. Konflik keagenan dapat timbul ketika agen tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak sesuai dengan kesejahteraan perusahaan. Konflik keagenan ini dapat timbul ketika *agen* dan *principal* memiliki perbedaan tujuan, pemilik ingin memaksimalkan keuntungan jangka panjang sedangkan agen ingin fokus pada keuntungan jangka pendek atau fokus pada proyek – proyek yang memberikan keuntungan pribadi. Selain perbedaan tujuan, konflik keagenan juga diperkuat dengan adanya *asimetri* informasi, akses yang lebih besar terhadap informasi perusahaan memungkinkan manajer untuk bertindak menyalahi aturan sehingga merugikan *principal*.

Konflik keagenan lainnya yaitu *asimetri* informasi yang timbul karena manajer atau (*agen*) mempunyai akses informasi perusahaan yang lebih baik, jika dibandingkan dengan pemilik, sehingga dapat menimbulkan perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer yang bertentangan dengan kepentingan pemilik (*principal*) demi keuntungan pribadi. Perilaku oportunistik dapat dilakukan oleh agen sehingga menyebabkan tindakan yang merugikan perusahaan. *Agency cost* dapat memunculkan biaya *monitoring* seperti biaya audit, penganggaran, biaya perikatan yang dikeluarkan oleh agen.

Teori agensi, hubungan antara manajer (*agen*) dan pemilik (*principal*) sering digambarkan sebagai hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, yaitu meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik. Hubungan kontraktual

memberikan insentif yang cukup bagi manajer untuk berusaha keras mencapai tujuan perusahaan.

Kerangka teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual yang ditimbulkan oleh pemilik dan agen dapat dioptimalkan melalui penggunaan kontrak insentif. Tujuan dari adanya kontrak insentif harapannya dapat mengurangi masalah dalam hubungan agensi, sehingga manajer dapat lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Teori agensi (*Agency Theory*) digunakan oleh perusahaan untuk mengatur hubungan antara *principal* dan *agen*. Teori *principal-agen* ini berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Teori keagenan memainkan peran penting dalam akuntansi karena membantu dalam pengambilan keputusan tentang cara menjalankan bisnis suatu perusahaan. GCG diharapkan dapat memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sehingga investor lebih yakin atas dana yang diinvestasikan, karena menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan.

2.1.2 Teori Stewardship

Teori stewardship menurut Donaldson & Davis (1991) menjelaskan bahwa para manajer bertindak sebagai steward untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan bertindak demi kepentingan pemegang saham, tanpa mengejar kepentingan pribadi manajer. Selain itu, menurut Hernandez (2008), teori stewardship menekankan pada bagaimana manajer dapat

berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi melalui mekanisme yang didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama.

Teori stewardship pertama kali diperkenalkan oleh Doladson dan Davis sebagai respons terhadap keterbatasan teori keagenan pada tahun 1990-an. Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) berfokus pada konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agent), manajer dianggap sebagai individu yang mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan pemilik, sehingga memerlukan pengawasan dan insentif untuk memastikan bahwa mereka bertindak dengan tujuan pemilik. Tetapi, pada teori stewardship berpendapat bahwa manajer sebagai steward, memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan.

Sejak diperkenalkan, teori stewardship telah berkembang dan diterapkan dalam berbagai penelitian, termasuk corporate governance, dan akuntansi. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa struktur organisasi yang mendukung kolaborasi dan kepercayaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Hernandez (2008) dimensi baru pada teori stewardship dengan menekankan pentingnya perilaku steward dalam perusahaan, selain itu pemimpin yang mempromosikan perilaku stewardship dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif.

Teori stewardship dibedakan dari teori agensi oleh beberapa asumsi fundamental. Asumsi ini menunjukkan bahwa perilaku manajer dan

hubungannya dengan pemilik perusahaan dipandang baik. Asumsi – asumsi yang menjadi dasar teori stewardship adalah, sebagai berikut :

1. Kepercayaan (Trust)

Salah satu asumsi utama dalam teori stewardship adalah bahwa ada kepercayaan antara pemilik dan manajer, dalam penelitian ini pemilik percaya bahwa manajer akan bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Kepercayaan ini memungkinkan manajer membuat keputusan yang lebih kreatif dan fleksibel. Kepercayaan juga menghasilkan lingkungan kerja yang positif di mana manajer merasa didukung dan dihargai saat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

2. Orientasi kolektif (Collective Orientation)

Teori stewardship menekankan bahwa orientasi kolektif sangat penting, dalam orientasi kolektif manajer dan pemilik bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapainya. Dalam kerangka ini, manajer dianggap sebagai bagian dari tim yang lebih besar, di mana keberhasilan setiap individu diukur berdasarkan seberapa besar kontribusi mereka terhadap keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Orientasi kolektif juga meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antara manajer dan pemilik.

3. Loyalitas manajer terhadap perusahaan (Managerial Loyalty)

Manajer harus loyal terhadap perusahaan, menurut teori stewardship lainnya. Rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap keberhasilan organisasi menghasilkan loyalitas. Manajer yang setia cenderung membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Loyalitas ini juga dapat membantu manajer menghindari membuat keputusan yang merugikan karena manajer merasa terikat untuk bertindak demi kepentingan pemilik dan perusahaan.

Terdapat karakteristik utama dalam teori stewardship yang membedakan steward dari agen pada teori keagenan, karakteristik ini menggambarkan bagaimana steward menjalankan perannya dalam mengelola organisasi dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Berikut karakteristik utama teori stewardship :

1. Bertanggung jawab dan transparan atas pengelolaan aset dan sumber daya perusahaan dengan iktikad baik dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan serta kepentingan semua pemangku kepentingan. Manajer diharapkan menjalankan tugasnya secara jujur, transparan dan akuntabel kepada pemilik dan stakeholder lainnya,
2. Dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi, steward dianggap memiliki motivasi intrinsik yang mendorong mereka untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Manajer dipercaya mampu menjaga dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan perilaku yang jujur dan berintegritas tinggi.

3. Mengutamakan kepentingan organisasi dan kolektif, berbeda dengan teori keagenan yang melihat manajer cenderung mengejar kepentingan pribadi, pada teori stewardship mengasumsikan bahwa steward memandang keberhasilan organisasi sebagai tujuan utama dan bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Steward merasa kepentingan bersama lebih utama dan berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi.
4. Motivasi intrinsik dan orientasi jangka panjang, teori stewardship menekankan bahwa manajer termotivasi oleh nilai – nilai seperti pencapaian, tanggung jawab, dan kepuasan kerja yang berasal dari kontribusi terhadap perusahaan, bukan oleh insentif eksternal semata, steward berorientasi pada tujuan jangka panjang organisasi dan keberlanjutan kinerja perusahaan.
5. Hubungan kepercayaan antara principal dan steward, pada teori stewardship menekankan adanya hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemilik (principal) dan pengelola (steward), di mana steward berkomitmen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan principal dan stakeholder.

Motivasi utama steward dalam menjalankan tugasnya menurut Syahara dkk. (2024) berasal dari motivasi intrinsik individu, nilai – nilai pribadi, rasa tanggung jawab, dan komitmen terhadap tujuan organisasi mendorong manajer. Nilai – nilai ini dianggap sebagai bagian dari peran dan identitas sosial manajer. Menurut Donaldson & Davis (1991), steward

berperilaku untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Steward merasa memiliki tanggung jawab moral dan psikologis untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efektif demi keberlanjutan dan tujuan jangka panjang perusahaan. Motivasi intrinsik ini juga mendorong steward untuk bekerja keras, berinovasi, dan mengambil keputusan yang mendukung tujuan bersama tanpa perlu pengawasan yang ketat. Selain itu, menurut Zanra (2024) teori stewardship menekankan bahwa lingkungan perusahaan yang mendukung nilai – nilai keterbukaan, kepercayaan, dan otonomi akan memperkuat motivasi steward untuk bertindak secara bertanggung jawab dan kolaboratif demi kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Hubungan antara principal dan steward dalam teori stewardship didasarkan pada kepercayaan yang kuat. Menurut Davis dkk. (1997), dalam teori stewardship, principal mempercayakan pengelolaan organisasi kepada steward dengan keyakinan bahwa steward akan bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kepercayaan ini memungkinkan principal memberikan otonomi yang lebih besar kepada steward tanpa perlu pengawasan ketat, sehingga hubungan ini bersifat kolaboratif dan sinergis.

Davis dkk. (1997) juga menjelaskan bahwa steward memandang konflik kepentingan bukan sebagai kondisi yang inheren atau dominan dalam hubungan principal – agent, melainkan sesuatu yang dapat diminimalisir melalui komitmen moral dan loyalitas steward terhadap

perusahaan. Steward berorientasi pada tujuan bersama dan keberhasilan perusahaan, sehingga steward berusaha menghindari perilaku yang merugikan principal. Dengan demikian, teori stewardship menekankan bahwa steward memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan kolektif dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Selain itu, hubungan yang didasari kepercayaan ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, karena steward merasa memiliki tanggung jawab moral dan psikologis untuk memenuhi ekspektasi principal.

Relevansi teori stewardship dengan topik penelitian terletak pada asumsi bahwa dewan komisaris, dewan direksi, komite audit serta pemegang saham institusional dan manajerial yang kuat akan lebih terdorong untuk mengutamakan kepentingan perusahaan, ketika manajer diberi kepercayaan dan otonomi, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab modal dan psikologis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryanto & Refianto (2019) pada perusahaan manufaktur di Indonesia juga menggunakan teori stewardship sebagai salah satu landasan teoritis. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan GCG yang diukur melalui keberadaan komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini mendukung asumsi teori stewardship bahwa organ – organ dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerja agar tujuan perusahaan

tercapai, dan secara otomatis menerapkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance Suryanto & Refianto (2019).

Teori stewardship menjadi landasan teori yang sangat relevan dan penting dalam penelitian ini, sebagai teori pendukung di samping teori keagenan, teori stewardship memberikan perspektif yang berbeda dengan menekankan pada motivasi intrinsik, tanggung jawab modal, dan kepercayaan antara menekankan pada motivasi intrinsik, tanggung jawab, moral dan kepercayaan manajer (steward) dan pemegang saham (principal). Berbeda dengan teori keagenan yang berasumsi bahwa manajer cenderung oportunistik dan memerlukan pengawasan ketat, teori stewardship justru melihat manajer sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk memaksimalkan nilai perusahaan demi kepentingan bersama. Dengan demikian, teori stewardship tidak hanya memperkaya analisis penelitian ini, tetapi juga membantu menjelaskan fenomena di mana praktik GCG yang baik dan struktur kepemilikan yang tepat dalam menciptakan lingkungan di mana manajer bertindak sebagai steward bukan sekadar agen sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan diterapkan oleh perusahaan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku. Kinerja keuangan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. Perusahaan dapat dikatakan sehat dalam laporan keuangan merupakan perusahaan yang memenuhi karakteristik sesuai ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *General*

Accepted Accounting Principle (GAAP) ataupun standar terkait yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan Setyawan (2019).

Menurut Setyawan (2019) terdapat tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat meliputi beberapa aspek penting :

1. Menentukan kontribusi divisi untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing divisi ataupun sub divisi terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Hal ini dapat mencakup evaluasi ekonomi atau segmen yang memungkinkan manajemen untuk memahami peran setiap bagian dalam mencapai tujuan perusahaan
2. Evaluasi kualitas kerja manajer dapat digunakan untuk memberikan daftar evaluasi yang menilai kualitas kerja para manajer divisi. Sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi manajer yang berkinerja baik dan yang memerlukan perbaikan.
3. Memotivasi manajer divisi agar tetap konsisten dalam operasional mereka, sesuai dengan tujuan pokok perusahaan. Dengan adanya sistem pengukuran yang jelas, diharapkan manajer dapat lebih fokus dan terarah dalam mencapai target yang telah ditetapkan

Tujuan – tujuan tersebut, pengukuran kinerja keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan

Manfaat penilaian kinerja keuangan adalah untuk mengidentifikasi masalah keuangan yang timbul tanpa disadari oleh perusahaan. Mulyadi dalam Barus dkk. (2017) menjelaskan manfaat penilaian kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja operasional melalui pengelolaan yang efisien dan terstruktur dengan penilaian kinerja bertujuan untuk mengelola operasi perusahaan dengan cara efektif dan efisien, serta memaksimalkan motivasi karyawan
2. Mendukung pengambilan keputusan pada penilaian ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait karyawan, termasuk promosi, transfer dan pemutusan hubungan kerja
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan dalam proses penilaian kinerja penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan karyawan serta menetapkan kriteria dalam pemilihan dan evaluasi program pelatihan yang tepat
4. Memberikan masukan (*feedback*) kepada karyawan mengenai evaluasi kinerja yang diberikan atasan.
5. Dasar untuk distribusi penghargaan dalam penilaian kinerja juga dapat memberikan dasar bagi penghargaan di dalam organisasi.

Fahmi dalam Novitasari dkk. (2022) menjelaskan kondisi kinerja keuangan dapat dikatakan sehat apabila memenuhi karakteristik

1. Dapat dipahami (*understable*) bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan.
2. Relevan yaitu informasi dalam laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan. Relevansi informasi juga harus mempertimbangkan prinsip materialitas.
3. Andal dan dapat dipercaya yaitu laporan keuangan dianggap dapat dipercaya jika disajikan dengan jujur, mengikuti prinsip "*substance over form*" yang berarti laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi suatu transaksi atau peristiwa. Prinsip *substance over form* lebih mengutamakan hakikat ekonomi daripada hakikat formal. Selain itu, laporan harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan kelengkapan.
4. Daya banding yaitu laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya agar informasi tersebut digunakan untuk analisis dan prediksi keuangan di masa depan. Selain itu, penggunaan teknik dan basis pengukuran juga harus konsisten.
5. Netral yaitu laporan keuangan yang disajikan harus dilakukan untuk kepentingan umum pengguna dan bukan untuk kepentingan badan hukum tertentu.

6. Objektif yaitu laporan keuangan harus memberikan informasi yang valid dan dapat diuji kebenarannya.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan. Penelitian terkait kinerja keuangan umumnya indikator yang digunakan adalah rasio keuangan Titania & Taqwa (2023). Pada penelitian ini, rasio yang digunakan adalah Return On Assets (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian sebelumnya Margaret & Daljono (2023a) menyatakan bahwa profitabilitas aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan disebut ROA.

Pada penelitian ini, Return On Assets (ROA) dipilih sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja keuangan. pemilihan ROA didasarkan beberapa pertimbangan berikut :

1. ROA menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan manufaktur yang memiliki aset tetap dan modal kerja yang besar.
2. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelola.
3. ROA bersifat objektif, mudah dihitung, dan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan antar perusahaan maupun antar periode waktu, baik secara internal maupun eksternal.

4. ROA sering dijadikan acuan oleh investor, kreditor, dan manajemen untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak terkait.
5. Banyak penelitian sebelumnya yang juga menggunakan ROA sebagai indikator kinerja keuangan, sehingga hasil penelitian ini dapat dibandingkan secara empiris dengan studi - studi terdahulu.

2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme *corporate governance* yang didasarkan pada prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas tanggung jawab, independensi, kesetaraan serta keadilan dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan Adi & Suwarti (2022). Pada tahun 1992, Commite Cadbury memperkenalkan istilah Good Corporate Governance, yang menjelaskan Corporate Governance merupakan suatu sistem yang melakukan pengawasan dan memimpin organisasi. Sejak tahun 1998 – an, saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi, masyarakat mulai memperhatikan corporate governance. Selain itu, menurut Economic Risk Consultancy (PERC) dan Asian Development Bank (ADB), penyebab krisis ekonomi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar pengelolaan perusahaan.

Good Corporate Governance berfungsi sebagai upaya perusahaan untuk membangun hubungan harmonis antara berbagai pemangku kepentingan di dalam perusahaan Margaret & Daljono (2023). GCG membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan, yaitu meraih

keuntungan. Manfaat yang diperoleh menjadi salah satu indikator atau penjelasan tentang kekuatan atau kinerja keuangan perusahaan yang tercantum di dalam laporan keuangan Dzaky dkk. (2021).

Menurut OECD (2004), Corporate Governance melibatkan interaksi antara pemegang saham, manajemen, direksi, dan pihak – pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, Pemerintah korporasi membutuhkan organisasi, alat dan sistem untuk memantau kinerja perusahaan. OECD *Principles of Corporate Governance* merupakan pedoman yang dirancang untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum, regulasi dan institusional yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Terdapat prinsip – prinsip penting GCG yang diperkenalkan oleh OECD, yaitu :

1. Landasan bagi kerangka tata kelola yang efektif. Prinsip ini menyoroti pentingnya sistem hukum dan regulasi yang adil serta transparan guna menjamin efisiensi dalam alokasi sumber daya.
2. Hak dan perlakuan setara bagi pemegang saham yaitu menjamin bahwa semua pemegang saham diperlakukan secara asli dan memiliki hak yang jelas dalam pengambilan keputusan perusahaan.
3. Peran investor institusional yaitu mengakui investor institusional dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik melalui keterlibatan aktif.

4. Pengungkapan dan transparansi yaitu mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik
5. Tanggung jawab dewan direksi yaitu harus bertindak demi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Keberlanjutan dan ketahanan yaitu pentingnya mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam strategi perusahaan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang.

2.1.5 Dewan Komisaris

Menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Ayat 6 Dewan Komisaris anggota dari struktur organisasi perusahaan yang bertugas mengawasi jalannya operasional, baik secara menyeluruh maupun spesifik, sesuai ketentuan anggaran dasar, dan memberikan koordinasi kepada direksi. Cadbury Report, Dewan Komisaris merupakan sekelompok orang yang dipilih rapat umum pemegang saham untuk mengawasi arah kebijakan perusahaan dan memberikan pandangan strategis kepada direksi.

Tugas dewan komisaris yaitu memberikan saran serta pengawasan kepada direksi tentang kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam operasi perusahaan. Kebijakan yang diprioritaskan oleh dewan komisaris adalah kebijakan yang bersifat strategis dan signifikan, karena tugas dewan komisaris mencakup memantau kemampuan

perusahaan untuk bertahan, melakukan operasi, dan berkembang Kholis (2024). Dalam melaksanakan tugas serta wewenanganya, Dewan Komisaris wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan per undang – undangan yang berlaku, khususnya Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (1) hingga ayat (5), yang menetapkan tanggung jawab dan fungsi dewan komisaris:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, termasuk kebijakan pengelolaan serta pelaksanaannya secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan operasional perusahaan maupun kegiatan usahanya, serta memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1)
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dengan penuh iktikad baik, ke hati – hatian, serta tanggung jawab demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan visi serta tujuan perusahaan
3. Anggota Dewan Komisaris secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami perusahaan apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Dewan Komisaris yang terdiri dari dua orang atau lebih, maka tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota

5. Anggota Dewan Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (3), apabila mampu memberikan bukti yang menunjukkan hal-hal tertentu:

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian dalam memenuhi kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
- b) Menjaga independensi tanpa adanya kepentingan pribadi dalam bentuk apa pun atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian
- c) Telah menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Direksi guna mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.05/2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014 mengenai Good Corporate Governance bagi Perusahaan Pembiayaan, menyatakan pada Pasal 18 menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki aset melebihi Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) diwajibkan memiliki minimal dua orang anggota dalam jajaran dewan komisaris. Perusahaan juga wajib memiliki minimal satu orang dewan komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia untuk memastikan pengawasan yang efektif dan representasi yang sesuai.

Dewan komisaris memiliki peran krusial dalam implementasi prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu melalui fungsi pengawasan dan pemberian ranah kepada Direksi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan GCG dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi lain dewan direksi yaitu sebagai penghubung antara manajemen dan pemangku kepentingan, dan memastikan pengambilan keputusan tetap transparan dan akuntabel dan keputusan direksi tetap sesuai dengan tujuan perusahaan dan stakeholder. Dapat disimpulkan meningkatnya kinerja keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap GCG dengan efektifnya keberjalanan dewan komisaris.

2.1.6 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah badan eksekutif bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Dewan direksi juga memainkan peran dalam merumuskan visi, misi dan strategi jangka panjang perusahaan serta mengawasi implementasi rencana tersebut dalam kegiatan sehari – hari perusahaan. Menurut Iqbal (2012) dalam Suryastuti (2017) Dewan Direksi mengawasi sepenuhnya atas segala aspek operasional dan manajerial perusahaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan. Berdasarkan Undang – undang No.40 Tahun 2007 pasal 1 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Direksi memiliki kewenangan dan sepenuhnya

bertanggung jawab dalam mengelola perseroan demi kepentingan perusahaan, sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan, serta memenuhi persyaratan anggaran dasar untuk mewakili perusahaan dalam proses hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Setiap dewan direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas segala hal kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. tanggung jawab tersebut sesuai dengan prinsip GCG yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Direksi memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut :

4. Mengelola operasional perusahaan dengan menyusun kebijakan – kebijakan yang sesuai dan mendukung tujuan perusahaan.
5. Melakukan seleksi, pengangkatan, serta pengawasan terhadap kinerja pegawai dan para manajer atau kepala bagian.
6. Dewan Direksi berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran tahunan perusahaan
7. Menginformasikan kinerja perusahaan kepada pemegang saham.

Fungsi lain dari dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi sumber daya yang ada dalam perusahaan dan menetapkan kebijakan dan arah gerak. Adanya dewan direksi yang baik dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan Adi & Suwarti (2022a). Dewan direksi memainkan

peran penting dalam memastikan penerapan GCG berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Dewan direksi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal dan pengambilan keputusan strategis.

2.1.7 Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/OJK.04/2015 Pasal (1) mengenai Pembentukan serta Pedoman Pelaksanaan Kerja, regulasi ini menetapkan ketentuan dasar terkait pembentukan dan tata cara kerja organ pengawasan internal dalam suatu perusahaan. Salah satu organ tersebut adalah komite audit, yaitu unit kerja di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Komite audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan berperan dalam memastikan bahwa proses pelaporan keuangan pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan berjalan secara efektif, Menurut Harahap (2016) dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perseroan Terbatas” komite audit bersifat fakultatif yang berarti dapat dibentuk berdasarkan kebijakan dewan komisaris namun keberadaannya menjadi wajib bagi perusahaan publik.

Komite audit merupakan representasi dari fungsi pengawasan yang lebih efisien, di mana peranan komite audit krusial dalam mengevaluasi implementasi kegiatan serta hasil audit internal dan eksternal, sehingga eksistensi komite audit sangat memengaruhi kualitas kinerja keuangan. Berdasarkan POJK No. 55/OJK.04/2015 mengenai pembentukan dan pedoman untuk tugas Komite Audit, menurut Pasal 4 komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang, yang terdiri atas satu ketua dan dua

anggota lainnya yang berasal dari pihak independen eksternal. Sementara itu, dalam pasal 7 huruf E dinyatakan bahwa setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan serta kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Pemilihan anggota lainnya juga harus mengikuti kriteria tertentu yang ditetapkan, agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang cukup terhadap isu – isu penting dalam akuntansi serta mampu berperan aktif dalam mendeteksi dan menelaah potensi permasalahan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Faktor – faktor berikut ini yang dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam menerapkan GCG :

1. Ukuran dan komposisi komite audit yaitu ukuran komite audit berpengaruh penting terhadap efektivitasnya. Komite audit yang memiliki jumlah optimal dapat menggabungkan berbagai keahlian perspektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
2. Independensi komite audit yaitu untuk mencapai pengawasan yang efektif, komite audit harus terdiri dari anggota yang independen sehingga bebas dari pengaruh manajemen dan dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja perusahaan
3. Frekuensi pertemuan yaitu efektivitas komite audit sangat dipengaruhi oleh frekuensi pertemuan. Pertemuan yang sering diadakan dapat memungkinkan anggota komite untuk selalu terbaru dengan perkembangan terbaru dalam perusahaan

4. Kualitas interaksi dengan auditor eksternal yaitu kualitas hubungan antara komite audit dan auditor eksternal memiliki peran krusial dalam efektivitas pengawasan laporan keuangan. Komunikasi yang efektif antara kedua pihak memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah dan memastikan tindak lanjut yang tepat atas temuan audit

Sebagai bagian yang menjaga kerahasiaan laporan keuangan, komite audit memiliki peran sentral dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Bertindak independen dan berlandaskan integritas, komite audit tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Peran komite audit sebagai penghubung antara sejumlah pemangku kepentingan dalam proses audit, termasuk auditor eksternal, dewan komisaris, dan internal auditor.

2.1.8 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, baik lembaga domestik maupun internasional memiliki saham dalam suatu perusahaan, termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lembaga lainnya Saifi (2019). Institusi merupakan sebuah lembaga besar yang biasanya memiliki saham di beberapa perusahaan, sehingga institusi tersebut memiliki divisi khusus untuk mengelola investasi perusahaan dan monitoring khusus sehingga institusi tersebut dapat melihat perkembangan investasinya secara profesional.

Penelitian Bathala (1994) dalam Widyati (2013) kepemilikan institusi dapat menjadi salah satu agen pengawasan yang melindungi investasi saham dalam perusahaan. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, kesejahteraan pemegang saham dan penerapan GCG akan lebih baik. Kepemilikan institusional biasanya berorientasi pada investasi jangka panjang, yang mendorong perusahaan untuk lebih mengutamakan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas dalam kinerja keuangan.

Struktur kepemilikan dalam pasar modal Indonesia yang paling umum adalah kepemilikan institusional, karena struktur kepemilikan yang unik dan sebagian besar perusahaan biasanya diwakili oleh pendiri perusahaan, atau kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diharapkan memberikan pengawasan yang lebih efektif sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat dan mengurangi *agency cost* dan pada akhirnya tujuan perusahaan tercapai

2.1.9 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada jumlah saham perusahaan yang secara langsung dimiliki oleh pihak manajemen, seperti direksi atau komisaris yang dapat berperan sebagai pemegang saham sekaligus pengelola perusahaan. Pemimpin dari manajemen perusahaan disebut manajer, manajer dapat dibagi menjadi 3 kedudukan, yaitu :

1. Top level manajemen merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam perusahaan yang bertanggung jawabkan perencanaan, strategi dan kebijakan perusahaan. dalam top level manajemen terdiri dari *Chief Executive Office* (CEO), C-level

executive seperti *Chief Finance Officer* (CFO), *Chief Marketing Officer* (CMO), *Chief Human Resource Officer* (CHRO), dan board of director atau dewan direksi.

2. Middle Level Manajemen merupakan tingkatan tengah dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab pada top level manajemen dan bertanggung jawab untuk memimpin manajer di tingkat bawah. Biasanya middle level manajemen terdiri dari manajer departemen, supervisor, manajer proyek
3. Lower Level Manajemen merupakan tingkatan paling bawah dan mempunyai wewenang terbatas sehingga bertanggung jawab penuh kepada manajer di tingkat menengah. Biasanya terdiri dari supervisor tim, koordinator tim, dan kepala bagian

Menurut penelitian Nisrina dkk. (2022) kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu – individu yang memegang jabatan strategis dalam perusahaan, seperti komisaris dan direksi dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial menyetarakan kedudukan manajemen perusahaan dengan pemilik lainnya. Manajemen diharapkan dapat lebih mementingkan tujuan kepemilikan saham serta meningkatkan kepercayaan dan nilai perusahaan.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Saifi (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang *go-public* di BEI dengan menggunakan populasi tahun 2011-2015. Dewan

Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional menjadi variabel independen pada penelitian, sementara kinerja keuangan menggunakan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Penelitian Saifi (2019) mengindikasikan variabel independen berupa dewan komisaris independen serta kepemilikan institusional berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, menggunakan indikator Return On Equity (ROE), sementara variabel independen dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial menghasilkan positif dan signifikan terhadap ROA.

Nisrina dkk. (2022) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub sektor *Food and Beverage* yang berasal dari BEI, populasi yang digunakan periode 2016 – 2019. Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional digunakan sebagai variabel independen, sementara kinerja keuangan yang diprosikan oleh ROA dan ROE digunakan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian Nisrina yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan melalui ROA. Dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap ROE. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE.

Margaret & Daljono (2023) pada penelitian Margaret dan Daljono yang menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia) tahun 2017 – 2021. Variabel independen yang digunakan oleh Margaret dan Daljono adalah dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah, sementara variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diproksikan menggunakan ROA. Penelitian menghasilkan dewan direksi, dan kepemilikan institusional memiliki hasil positif terhadap ROA, sementara dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Wardhani & Suwarno (2021) yang berjudul Pengaruh kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2019. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan, variabel dependen yang dipilih oleh penulis yaitu kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran ROA. Hasil yang didapatkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak memiliki signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara secara simultan

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hariadi dkk. (2022) pada penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance & Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan*. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang menggunakan ROA sebagai indikator pengukuran, dan variabel independen yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan CSR. Penelitian tersebut menghasilkan variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, dewan direksi dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Adi & Suwarti (2022) meneliti *Pengaruh penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022*. Variabel dependen yang digunakan yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, sedangkan ROA digunakan sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian Adi dan Suwarti adalah perusahaan perbankan dengan 126 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara itu Dewan direksi dan komite audit justru memberikan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan, di sisi lain Kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

Tabel 2. 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh Muhammad Saifi (2019)	Variabel Independen : • Dewan Komisaris Independen • Kepemilikan Manajerial • kepemilikan Institusional Variabel Dependen : Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE	• Pengaruh negatif signifikan antara dewan komisaris independen dengan ROE • Pengaruh negatif signifikan antara kepemilikan institusional dengan ROE • Dewan komisaris

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA
2.	Pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan	Variabel Independen • Dewan komisaris independen • Komite audit • Kepemilikan Manajerial • Kepemilikan institusional Variabel Dependen :	• Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempengaruhi

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	manufaktur sub sektor Food and Beverage. Oleh Shofa Nisrina, Isthi Wahyuning Tyas, Arjuna Wiwaha (2023)	Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE	ROA secara positif - Dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif terhadap ROE - Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ROE
3.	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan	Variable Independen : - Dewan komisaaris independent - Dewan direksi - Komite audit	Dewan direksi, dan kepemilikan institusional berpengaruh

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). Oleh : Ermalyani Margaret, Daljono (2023)	• Kepemilikan manajerial • Kepemilikan institusional • Kepemilikan pemerintah Variable Dependen : Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA	positif terhadap ROA • Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap ROA
4.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja	Variable Independen : • Kepemilikan institusional • Kepemilikan manajerial • Struktur modal • Ukuran perusahaan Variabel dependen :	• Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Oleh : Yashinta Ariana Wardhani, Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si (2021)	Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA	keuangan perusahaan • Secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
5	Pengaruh Good Corporate Governance & Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja	Variabel Independen : • Dewan komisaris independen • Dewan direksi • Kepemilikan institusional	• Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan CSR

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Keuangan (The Influence of GCG and CSR on Financial Performance). Oleh : Sugeng Hariadi, Dina Rensita Putri, Djoko Sugiono (2022)	• Kepemilikan manajerial • CSR Variabel Dependen : Kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA	berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan • Dewan direksi dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan
6	Pengaruh Penerapan Good Corporate	Variabel Independen : • Dewan komisaris • Dewan direksi	• Dewan komisaris tidak memiliki

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Oleh Sekar Arum Pirenaning Adi, Titiek Suwarti (2022)	• Komite audit • Kepemilikan institusional Variabel Dependen : Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA	pengaruh terhadap kinerja keuangan • Dewan direksi dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan • Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan
7.	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan	Variabel Independen : • Dewan komisaris • Dewan direksi • Komite audit	• Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan. Oleh : Viola Febrina, Dewi Sri (2022)	• Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen : Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA	terhadap kinerja keuangan • Dewan direksi dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
8.	Pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Oleh : Tri Diah Sari, Kartika	Variabel Independen : • Kepemilikan Manajerial • Komite Audit • Leverage • Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA	• Kepemilikan manajerial, komite audit, dan leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Hendra Titisari, Siti Nurlela (2020)		• Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Sumber : data analisis peneliti tahun 2024

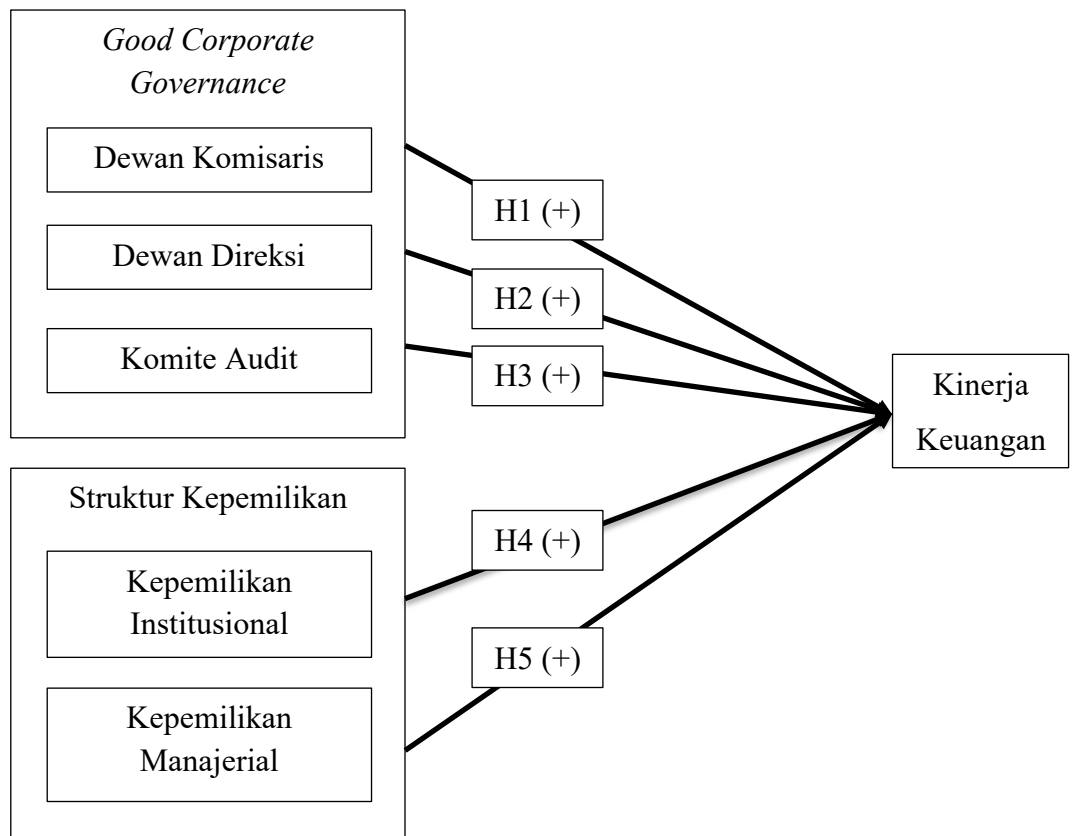
2.2 Kerangka Pemikiran

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah pengukuran kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, temuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasikan Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua variabel independen yaitu variabel *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Variabel selanjutnya adalah variabel struktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Selanjutnya alat ukur kinerja keuangan adalah Return On Assets (ROA) untuk variabel dependen dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini dibangun dengan mengacu pada dua teori utama, yaitu teori agensi dan teori stewardship. Berdasarkan teori agensi penerapan GCG dan struktur kepemilikan yang baik diperlukan untuk meminimalisir

konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Di sisi lain, teori stewardship berasumsi bahwa manajemen sebagai pengelola perusahaan akan bertindak sebagai pelayan (steward) yang mengutamakan kepentingan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan GCG dan struktur kepemilikan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong manajemen agar bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Teori agensi dan teori stewardship sebagai landasan penelitian, sehingga menyajikan kerangka berpikir bahwa GCG dan struktur kepemilikan yang baik mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, baik melalui mekanisme pengawasan maupun melalui peningkatan rasa tanggung jawab dan loyalitas manajemen terhadap perusahaan.

Kerangka Pemikiran



Sumber : data analisis penelitian tahun 2024

2.3 Hipotesis

Berbagai penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang bervariasi. Sehingga, temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel *Good Corporate Governance* (GCG), struktur kepemilikan dan kinerja keuangan. Penelitian ini terdapat lima hipotesis di antaranya sebagai berikut :

2.3.1 Pengaruh Dewan komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris dalam GCG memiliki posisi penting yaitu menjadi penengah antara principal dan dewan direksi. Peran utama dewan komisaris adalah melaksanakan. Tugas dewan komisaris adalah mengawasi

pelaksanaan aturan internal entitas bisnis, serta memastikan informasi yang disajikan bersifat lengkap dan memiliki mutu yang baik dalam pertanggung jawaban kinerja direksi. Selain itu, dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa prinsip - prinsip GCG dapat diterapkan secara optimal di dalam perusahaan. *Theory Agency* muncul sebagai akibat dari perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer, manajer cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan pemilik.

Dewan komisaris diharapkan dapat menyelesaikan konflik agensi ini dengan cara melakukan monitoring dan pengawasan terhadap manajemen sehingga keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan pemilik dan kepentingan perusahaan. Dewan komisaris juga dapat memberikan arahan strategis guna membantu mengurangi kesalahan dalam membentuk arahan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febrina & Sri (2022) menyimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Mengingat peran strategis dewan komisaris dalam mengawasi manajemen dan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, serta didukung oleh temuan terdahulu, penulis berpendapat bahwa keberadaan dan efektivitas dewan komisaris memengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara signifikan. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Direksi adalah bagian krusial perusahaan, hal tersebut sesuai dengan teori agensi bahwa direksi sebagai *agent* harus melakukan pengawasan terhadap informasi dalam pelaporan keuangan. Menurut penelitian Hariadi dkk. (2022) dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja keuangan, hal tersebut disebabkan tanggung jawab dewan direksi menetapkan dan mengelola kebijakan kinerja dan tata kelola yang efektif, namun tugas tersebut tidak dilakukan dengan baik karena diawasi oleh dewan komisaris independen sehingga pada penelitian tersebut menghasilkan hubungan negatif yang tidak signifikan.

Menurut penelitian Margaret & Daljono (2023) dewan direksi mempengaruhi secara positif terhadap kinerja keuangan karena jumlah dewan direksi yang maksimal pada akhirnya menjadi timbal balik yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga lebih banyak memiliki pengetahuan dan keakuratan perusahaan. Jumlah dewan direksi yang lebih besar akan berpotensi dewan direksi bekerja dan membuat keputusan yang lebih efisien, dan akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Melihat adanya perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa terdapat efektivitas dewan direksi dalam meningkatkan kinerja keuangan sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor – faktor kontekstual seperti struktur tata kelola perusahaan, komposisi dewan direksi dan industri kontekstual tempat perusahaan beroperasi. Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis kedua yaitu, sebagai berikut :

H2: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Pada *agency theory* komite audit berperan krusial dalam memastikan corporate governance yang efektif dan berprinsip baik, seperti peningkatan kinerja dan kualitas informasi perusahaan. Berdasarkan IKAI yaitu Ikatan Komite Audit Indonesia, definisi komite audit adalah sebuah organ yang melaksanakan tugas dengan independen dan profesional. Komite audit bertugas untuk mendampingi dewan komisaris melakukan tugas yang lebih baik dalam hal akuntansi, pengawasan internal dan laporan keuangan. *Agency theory* menunjukkan bahwa pengawasan manajemen yang baik dapat dihasilkan melalui komite audit.

Studi yang dilakukan oleh Nisrina dkk. (2022a) telah membuktikan bahwa kinerja keuangan dapat mempengaruhi komite audit, sejalan dengan penelitian Febrina & Sri (2022a). Sehingga semakin besar jumlah anggota komite audit dalam perusahaan manufaktur, maka tingkat pengawasan yang dilakukan cenderung semakin meningkat dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Penulis berpendapat bahwa peningkatan pengawasan melalui penambahan anggota komite audit dapat memperkuat tata kelola perusahaan, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akurasi dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Agency Theory menjelaskan adanya kesenjangan tujuan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dapat menimbulkan konflik kepentingan, pada akhirnya berpotensi menghambat kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional cenderung memiliki akses terhadap sumber daya dan keahlian yang lebih luas, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen secara lebih optimal, sebagaimana mekanisme pengendalian eksternal, diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian Saifi (2019) dan Adi & Suwarti (2022a) menghasilkan kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja keuangan. Menurut penelitian tersebut suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi besar dapat mengawasi aktivitas perusahaan secara aktif dan keuntungan yang didapatkan akan lebih terkontrol. Pandangan ini mendukung teori yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyebutkan sangat mungkin bahwa manajemen dan pemegang saham tidak setuju satu sama lain karena kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat membantu manajer memantau pilihan sehingga penulis berpendapat bahwa kepemilikan institusional dapat memengaruhi pengawasan kinerja keuangan bisnis secara signifikan, sehingga manajemen bisnis akan berkonsentrasi untuk meningkatkan kinerja keuangan, kesimpulan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bagaimana

kepemilikan institusional memengaruhi kinerja keuangan. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis keempat yaitu :

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan *Agency theory*, kepemilikan manajerial dapat menekankan kecenderungan manajer untuk menyalahgunakan sumber daya dan wewenang yang dimilikinya. Hal tersebut terjadi karena manajer yang ikut memiliki saham dapat merasakan dampak negatif yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh manajer itu sendiri, sehingga dengan kepemilikan saham tersebut manajer akan lebih cermat dalam mengambil keputusan. Konflik keagenan dapat diminimalisir melalui adanya kepemilikan saham oleh manajer.

Penelitian sebelumnya oleh Saifi (2019) menghasilkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat diasumsikan peningkatan kepemilikan saham manajerial dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penulis berpendapat bahwa keberadaan kepemilikan manajerial memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajer terhadap peningkatan nilai perusahaan, karena kepentingan pribadi manajer selaras dengan kepentingan pemegang saham. Sehingga, diharapkan mampu meminimalkan konflik keagenan dan mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dapat ditarik kesimpulan hipotesis kelima yang dapat diajukan :

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan